

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan pelaksana birokrasi pemerintahan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan pendelegasian wewenang yang diselenggarakan pada organisasi tersebut. Untuk itu setiap organisasi sektor publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dimulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pengendalian. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk mengevaluasi kinerja keuangan organisasi sektor publik yang harus disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Untuk memastikan keandalan laporan keuangan diperlukan adanya proses evaluasi melalui kegiatan pemeriksaan (*auditing*).

Audit pada organisasi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik. Audit pada organisasi sektor publik juga dapat menjadi langkah penting terwujudnya *good governance* di lingkungan pemerintahan. Hasil akhir dari pelaksanaan audit akan dinyatakan dalam bentuk opini. Umumnya para pengguna laporan keuangan akan menggunakan opini auditor untuk dijadikan patokan evaluasi kinerja organisasi. Laporan keuangan yang telah melalui proses audit akan lebih diandalkan apabila menerima opini wajar tanpa pengecualian, karena opini akan memberikan gambaran bahwa laporan keuangan organisasi

telah disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum (PABU) dan telah melakukan pengungkapan secara memadai.

Pentingnya evaluasi kinerja organisasi sektor publik membuat jasa audit independen pemerintahan sangat dibutuhkan untuk menjamin keandalan laporan keuangan sektor publik. Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Auditor eksternal pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan yang tidak tunduk kepada pemerintah sehingga perannya sebagai auditor independen pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan keandalan informasi keuangan organisasi sektor publik. Namun, pada kenyataannya kualitas audit yang dihasilkan BPK masih terdapat beberapa masalah karena banyaknya pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

Hal ini didukung oleh pemberitaan bahwa terdapat banyak kasus yang memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan penggunaan informasi atas kualitas audit yang dihasilkan BPK. Banyaknya dugaan korupsi disebabkan pemberian opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK yang seringkali tidak simetris dengan kinerja lapangan organisasi. Hal ini didasarkan atas pemberitaan oleh kantor berita politik RMOL.CO, beberapa kasus kecurangan mulai terdeteksi sebagai salah satu hasil kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

(FITRA) terhadap hasil audit BPK selama 2009-2011 yang menyebutkan bahwa hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian yang didapat oleh kementerian atau lembaga negara yang di keluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mengkhawatirkan. Hal ini terjadi karena ditemukan adanya 10 potensi korupsi pada 10 Kementrian. Khususnya kasus korupsi anggaran Al-Quran di kementrian agama menunjukkan opini WTP yang diberikan BPK tidak memberi jaminan instansi negara bebas dari korupsi. Menurut penuturan M Ichlas El Qudsi selaku anggota komisi XI DPR “Waktu yang dibutuhkan BPK tidak terlalu memadai untuk melakukan audit operasional sehingga seringkali hasil auditnya tidak objektif karena mengejar target”.

Hasil audit yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK seharusnya sudah mampu memberikan gambaran yang cukup baik terhadap kinerja organisasi Pemerintah apalagi mengingat opini yang diberikan oleh BPK seringkali dijadikan acuan sebagai penilaian prestasi kinerja. Namun tidak hanya kasus potensi korupsi kementrian, berdasarkan pemberitaan belitongekspres.co.id opini WTP yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung masih perlu ditinjau dan dievaluasi karena hal tersebut bertolak belakang dengan semakin meningkatnya kasus korupsi yang terjadi. Opini WTP ini tidak lagi menjadi prestasi yang membanggakan untuk akuntabilitas kinerja organisasi tetapi hal ini justru dimanfaatkan oknum pegawai pemerintahan sebagai alasan pembelaan diri apabila terdapat indikasi terjadinya korupsi.

Berdasarkan pejabaran kasus yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa opini yang diberikan auditor independen belum mampu dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi. Hal ini disebabkan oleh opini wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan dalam beberapa laporan hasil audit organisasi sektor publik masih diragukan keandalannya dan membutuhkan evaluasi serta peninjauan lebih lanjut. Kasus seperti ini sekaligus menjadi pertanyaan bagi publik tentang pertanggungjawaban auditor independen atas kualitas audit yang dihasilkan belum mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keandalan informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan.

Kualitas audit seharusnya menjadi masalah yang penting karena akan mempengaruhi pengguna informasi dalam menilai keandalan laporan keuangan serta peranan auditor independen dalam menghasilkan laporan audit. Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan dan melaporkan kekeliruan material yang terjadi dalam laporan keuangan (Tandiontong, 2016: 80). Kualitas audit yang baik seharusnya mampu mengungkapkan kemungkinan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan.

Kualitas audit dapat ditentukan oleh pelaksanaan prosedur audit yang memadai dan pengendalian personal auditor selama pengauditan. Namun dalam melakukan praktiknya, auditor seringkali dihadapkan pada suatu keadaan yang dapat menurunkan kualitas audit. Salah satu penyebab rendahnya kualitas audit yang dihasilkan adalah perilaku disfungsional yang dilakukan auditor. Perilaku disfungsional audit merupakan tindakan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi atau menurunkan kualitas audit

secara langsung maupun tidak langsung (Otley dan Pierce, 1996). Perilaku disfungsional yang berdampak langsung dengan kualitas audit disebut dengan perilaku reduksi kualitas audit (*reduced audit quality behavior*).

Perilaku reduksi kualitas audit didefinisikan sebagai perilaku yang sengaja dilakukan auditor dengan cara mereduksi bukti-bukti yang dikumpulkan menjadi tidak efektif selama pelaksanaan proses audit (Pramudianti, 2016). Perilaku ini memberikan dampak negatif terhadap kualitas audit karena bukti yang dikumpulkan selama proses pelaksanaan audit tidak cukup kompeten dan memadai untuk mendukung pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan menyangkut semua hal yang dianggap material. Probabilitas auditor menerbitkan opini yang salah semakin tinggi ketika auditor melaksanakan tindakan reduksi kualitas audit dalam pelaksanaan program audit (Tandiontong, 2016: 86).

Perilaku reduksi kualitas audit biasanya dilakukan dengan menghilangkan suatu prosedur audit yang seharusnya dilakukan berdasarkan program audit yang telah dibuat sebelumnya. Adanya perilaku reduksi kualitas audit pasti akan sangat mempengaruhi kualitas audit sehingga keandalan hasil audit tersebut diragukan.

Tekanan anggaran waktu adalah kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan (Sudrajat *et al.*, 2015). Dalam melaksanakan tugasnya BPK dituntut untuk menyelesaikan tugas berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Terkadang waktu yang diberikan tidak cukup untuk melakukan semua program audit yang dibutuhkan sehingga ada kemungkinan untuk melewati

prosedur audit yang seharusnya dilakukan. Selanjutnya kondisi ini dapat mendorong auditor untuk melakukan perilaku menyimpang oleh auditor.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan anggaran waktu yang dirasakan akan meningkatkan kecenderungan perilaku reduksi kualitas audit (Diana *et al.*, 2016; Pramudianti, 2016; Wintari *et al.*, 2015).

Perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh seorang auditor tidak lepas dari faktor internal yang ada dalam dirinya. *Locus of control* merupakan karakteristik auditor yang menggambarkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan yang dialaminya (Hartanto, 2016). Peneliti akan fokus ke *locus of control* eksternal yang merupakan kecenderungan individu tidak bisa memastikan dan mengendalikan kejadian yang dialami serta menyerahkan hasil-hasil yang penting dalam hidup mereka pada sebab-sebab yang berkaitan dengan lingkungan seperti faktor nasib, takdir maupun keberuntungan (Kreitner dan Kinicki, 2014: 133). Kecenderungan yang dialami oleh individu ini akan memunculkan tingkat tidak percaya diri yang tinggi karena semua hal yang terjadi berada diluar kendalinya dan ditentukan oleh nasib, sehingga hal ini membuat individu lebih cenderung melakukan tindakan menyimpang untuk mempertahankan posisinya yang secara langsung dapat menurunkan kualitas audit.

Penelitian terdahulu menyatakan *locus of control* eksternal berpengaruh positif terhadap perilaku disfungsional auditor (Rindawan, 2018), *locus of control* eksternal berpengaruh positif terhadap perilaku penurunan kualitas audit (Wintari

et al., 2015) dan *locus of control* berpengaruh positif terhadap perilaku reduksi kualitas audit (Hartanto, 2016) sedangkan hasil penelitian berbeda menunjukkan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap perilaku penurunan kualitas audit (Diana *et al.*, 2016).

Faktor internal lain yang dapat menentukan perilaku seorang auditor adalah *self esteem*. *Self esteem* adalah suatu keyakinan mengenai nilai dirinya sendiri berdasarkan pada evaluasi diri secara umum (Kreitner dan Kinicki, 2014: 123). Seseorang yang memiliki *self esteem* yang rendah memandang dirinya dalam pandangan negatif sehingga akan mudah terpengaruh dan bergantung pada orang lain sedangkan seseorang yang memiliki *self esteem* yang tinggi lebih yakin dan percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Individu yang memiliki *self esteem* yang rendah akan cenderung merasakan tekanan kerja yang tinggi dibanding dengan individu yang memiliki *self esteem* yang tinggi. Tekanan kerja yang dirasakan membuat individu lebih cenderung melakukan perilaku reduksi kualitas audit seperti penghentian prematur atas prosedur audit.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *self esteem* tidak berpengaruh terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (Budiman, 2013). Sedangkan penelitian terdahulu yang berbeda menyatakan bahwa *self esteem* berpengaruh negatif terhadap penghentian prematur atas prosedur audit (Damayanti *et al.*, 2017).

Komitmen yang dimiliki auditor terhadap profesinya termasuk hal penting yang dapat menentukan tindakan yang dilakukan oleh auditor selama melaksanakan tugasnya. Komitmen profesional didefinisikan sebagai kekuatan

relatif terhadap keterlibatan individu dalam profesi tertentu, serta kemauan untuk mengerahkan usaha atas nama profesi serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan didalamnya (Aranya dan Ferris, 1984). Komitmen profesional auditor yang tinggi akan membuat auditor memiliki rasa tanggung jawab penuh atas profesinya sehingga dalam pelaksanaan tugasnya auditor akan menjunjung tinggi standar audit yang berlaku. Kemungkinan untuk melakukan perilaku reduksi kualitas audit akan lebih kecil bagi auditor yang memiliki komitmen profesional yang tinggi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komitmen profesional berpengaruh negatif pada perilaku penurunan kualitas audit (Wintari *et al.*, 2015). Akan tetapi penelitian lain menunjukkan bahwa komitmen profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku reduksi kualitas audit (Malone and Robert, 1996).

Dalam melaksanakan audit, auditor sebelumnya sudah harus membuat program audit yang berisi kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis. Audit program harus dibuat sesuai standar dan kondisi suatu organisasi. Semakin efektif kelengkapan audit program maka akan semakin kecil tindakan penyimpangan yang akan dilakukan oleh seorang auditor sehingga akan semakin besar kemungkinan tercapainya tujuan pemeriksaan.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa program audit tidak berpengaruh positif terhadap penghentian prematur prosedur audit (Supardi, 2011). Penghentian prematur prosedur audit ini nantinya akan mempengaruhi perilaku reduksi kualitas audit secara langsung. Penelitian mengenai program audit ini

belum banyak dilakukan sehingga akan memungkinkan peneliti untuk menambah indikator yang dikembangkan berdasarkan teori yang sudah ada dalam hal pengukuran variabel program audit tersebut.

Berdasarkan uraian diatas terdapat kerugian yang mungkin ditimbulkan dari perilaku reduksi kualitas audit dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menjadi faktor pendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang perilaku reduksi kualitas audit di BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku auditor independen pemerintah. Penelitian ini menggunakan gabungan beberapa variabel independen dari penelitian sebelumnya seperti tekanan anggaran waktu, *locus of control* eksternal, *self esteem*, komitmen profesional dan program audit dengan judul **“Pengaruh Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perilaku Reduksi Kualitas Audit (Studi Kasus BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku reduksi kualitas audit ?
2. Bagaimanakah pengaruh *locus of control* eksternal terhadap perilaku reduksi kualitas audit ?
3. Bagaimanakah pengaruh *self esteem* terhadap perilaku reduksi kualitas audit ?
4. Bagaimanakah pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku reduksi kualitas audit ?

5. Bagaimanakah pengaruh program audit terhadap perilaku reduksi kualitas audit ?

1.3 Batasan Masalah

Penentuan batasan masalah bertujuan untuk memberikan ruang lingkup penelitian agar pembahasan masalah tidak terlalu luas dan dapat dilakukan secara terarah untuk mencapai tujuan penelitian. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti membatasi permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan perilaku reduksi kualitas audit. Variabel yang digunakan diantaranya tekanan anggaran waktu, *locus of control* eksternal, *self esteem*, komitmen profesional, program audit, dan perilaku reduksi kualitas audit.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan diantaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap perilaku reduksi kualitas audit.
2. Untuk menganalisis pengaruh *locus of control* eksternal terhadap perilaku reduksi kualitas audit.
3. Untuk menganalisis pengaruh *self esteem* terhadap perilaku reduksi kualitas audit.
4. Untuk menganalisis pengaruh komitmen profesional terhadap perilaku reduksi kualitas audit.

5. Untuk menganalisis pengaruh program audit terhadap perilaku reduksi kualitas audit.

1.5 Kontribusi penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa kontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah pengetahuan pembaca terkait dengan pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan perilaku reduksi kualitas audit. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kontribusi praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan perilaku reduksi kualitas audit oleh auditor.

3. Kontribusi kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah yang tepat untuk menghindari dan meminimalisasi kemungkinan terjadinya perilaku reduksi kualitas audit oleh auditor.

1.6 Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari keputusan peneliti melakukan penelitian ini, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka serta teori-teori yang relevan untuk mendukung variabel yang digunakan dalam penelitian, menjelaskan penelitian terdahulu, rerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukuran variabel serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian atas pengujian hipotesis beserta pembahasannya yang dikaitkan dengan data yang diperoleh peneliti maupun hasil yang didapat dari penelitian sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya maupun rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.